BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program Golden Passport Siprus menghadapi gejolak ekonomi dan politik yang kompleks, baik dari internal maupun eksternal. Gejolak ekonomi tercermin dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan proses naturalisasi yang terungkap dalam The Cyprus Papers oleh Al Jazeera. Sementara gejolak politik datang dari tekanan konsisten Uni Eropa melalui *infringement procedure* yang menilai program ini berseberangan dengan prinsip Uni Eropa yang diatur Pasal 4 TEU dan Pasal 20 TFEU serta secara tegas menuntut menghentikan Golden Passport. Hal tersebut menciptakan kondisi ketegangan antara upaya Siprus mempertahankan Golden Passport sebagai kepentingan ekonomi nasionalnya dan tekanan geopolitik Uni Eropa, yang membentuk tarik-menarik kepentingan dalam implementasi program ini.

Analisis melalui teori kepentingan nasional oleh Donald E. Nuechterlein, terhadap adanya gejolak dimensi ekonomi dan politik menunjukkan kepentingan nasional Siprus sebagai kepentingan dinamis yang dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Pergeseran dari dimensi kepentingan, intensitas kepentingan dan adanya dimensi yang diidentifikasi dalam *value* dan *cost factors* telah membawa Siprus memikirkan ulang kepentingan nasionalnya dalam keberlanjutan program Golden Passport mereka. Keputusan penghentian program per 1 November 2020 menjadi hasil akhir dari kompromi dan menunjukkan bahwa tekanan eksternal adalah hal yang dominan. Dengan demikian, gejolak dalam program Golden Passport Siprus memperlihatkan pertarungan antara kepentingan nasional dan tuntutan kepatuhan terhadap prinsip Uni Eropa, yang pada akhirnya menentukan akhir perjalanan program tersebut pada 1 November 2020.

5.2 Saran

Melalui temuan penelitian ini, penulis menyarankan negara-negara lain yang pernah atau sedang mengimplementasikan program Golden Passport untuk mengedepankan nilai transparansi, akuntabilitas dan kesesuaian dengan norma

hukum supranasional. Praktik pemberian kewarganegaraan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap reputasi nasional, stabilitas politik dan integritas sistem hukum bersama. Contoh dari kasus Siprus yang penuh kontroversi mengajarkan bahwa program ini dapat menjadi pintu gerbang menuju resiko korupsi dan keamanan. Di sini, negara yang memegang peran sentral sebagai garda terdepan dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel. Setiap negara yang berencana untuk menggunakan program semacam ini harus sangat berhati-hati dalam melakukan uji tuntas yang tepat dan memiliki sistem pengawasan untuk meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan. Tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga keteladanan moral dan politik dari para pemimpin negara. Tanpa aparatur yang bersih, setiap bentuk kebijakan berisiko disalahgunakan dan merusak kepentingan nasional itu sendiri.